

Jokowi Kembali Ingatkan Relawannya, Ojo Kesusu soal Calon Presiden 2024

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para pendukungnya yang tergabung dalam organisasi Pejuang Bravo Lima agar tidak terburu-buru dalam menentukan calon presiden yang akan didukung pada Pemilihan Presiden 2024.

Pengurus DPP Bravo Lima, Ruhut Sitompul menyatakan, hal itu disampaikan Jokowi saat memberikan arahan dalam acara rapat pimpinan nasional Bravo Lima di Ancol, Jakarta, Jumat (26/8).

"Sudah itu masalah politik ojo kesusu, bersabarlah, ya entah siapa calon presidennya yang penting kita kerja, kerja, kerja," kata Ruhut me-

nirukan ucapan Jokowi saat dihubungi wartawan, Jumat (26/8) siang.

Ruhut mengatakan bahwa Bravo Lima belum menentukan sosok yang akan didukung menjadi calon presiden karena masih mengutamakan konsolidasi internal.

Selain meminta pendukungnya bersabar soal pencalonan presiden, Jokowi juga mengingatkan bahwa Indonesia patut bersyukur karena mampu menghadapi krisis yang mendera dunia. "Kita bersyukur bisa melalui masalah yang dihadapi, sekarang memang suasana ekonomi dunia lagi krisis, tapi kita bersyukur juga masalah covid kita bisa atasi," ujar Ruhut. ● han

Kepala Daerah Persulit Perizinan Akan Dijerat dengan Pasal Pemerasan?

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang menjerat kepala daerah dengan pasal pemerasan.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto mengatakan, pasal tersebut bisa digunakan untuk menindak pejabat yang mempersulit investor dalam mendapatkan izin usaha.

"Sebenarnya ini pasal yang paling tepat adalah upaya-upaya pemerasan oleh orang-orang yang mempunyai kewenangan," kata Karyoto dalam konferensi pers di KPK, Kamis (26/8).

Perilaku pejabat atau kepala daerah yang mempersulit perizinan dan meminta sejumlah uang akan membuat pelaku usaha urung berinvestasi. Sebab, mereka memahami tindakan itu akan membuat mereka terjerat hukum.

Karyoto mengatakan,

kasus pemerasan berbeda dengan kasus suap. Pada kasus suap, kedua pihak baik kepala daerah maupun pengusaha sama-sama memiliki kehendak.

"Tapi kalau upaya pemerasan itu satu pihak yang sangat menghendaki. Karena apa? Ya sebenarnya investor tidak mau kalau disuruh bayar tidak mau," ujar Karyoto.

Karyoto mengaku telah mendorong tim penyelidikan KPK agar menindak perilaku pejabat yang mempersulit investasi dengan pasal pemerasan. Menurutnya, ancaman hukuman dalam pasal tersebut lebih berat. Meski demikian, ia mengaku KPK akan tetap melihat peran aktif para pengusaha tersebut dalam suatu kasus dugaan korupsi. "Dengan cara itu saya akan yakin hukumannya akan lebih berat," kata Karyoto. ● mei

2 | Polhukam

FOTO: ANT



PELAPORAN KASUS LAPORAN PALSU FERDY SAMBO DAN PUTRI CANDRAWATHI

Pengacara Keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, Kamaruddin Simanjuntak (tengah) menjawab pertanyaan wartawan saat tiba di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (26/8). Kedatangan pengacara Keluarga Brigadir J tersebut untuk melaporkan Ferdy Sambo dan istrinya, Putri Candrawathi terkait laporan palsu dugaan pecehan seksual yang dilayangkan kepada mendiang Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J dengan pasal yang disangkakan adalah pasal 317 dan 318 jo pasal 55 dan 56 KUHP.

Jokowi Tetapkan Tunjangan Kinerja Kepala BRIN Rp49,86 Juta Sebulan

Kepala BRIN diberikan tunjangan kinerja 150 persen dari tunjangan kinerja pada kelas jabatan tertinggi di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional.

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) terbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2022 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Diunduh dari situs JDII Sekretariat Negara, beleid ini antara lain mengatur bahwa kepala BRIN memperoleh tunjangan kinerja (tukin) Rp 49.860.000 setiap bulannya.

"Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional diberikan tunjangan kinerja sebesar 150 persen (seratus lima puluh persen) dari tunjangan kinerja pada kelas jabatan tertinggi di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional," demikian

Dalam Pasal 1 Ayat (1) Perpres 105/2022, diatur bahwa sekretaris, anggota Dewan Pengarah, dan staf khusus Dewan Pengarah yang tidak bersifat ex officio diberikan hak keuangan setiap bulan dan fasilitas lainnya.

Besaran hak keuangan yang mereka diatur dalam bagian lampiran Perpres 105/2022 yakni 10,5/12 dari tunjangan kinerja kepala BRIN atau sebesar Rp 43.627.500 bagi sekretaris Dewan Pengarah BRIN. Kemudian, Rp 41.550.000 atau 10/12 dari tunjangan kinerja kepala BRIN bagi anggota Dewan Pengarah BRIN, serta Rp 29.085.000 atau 7/12 dari tunjangan kinerja kepala BRIN bagi staf khusus ketua Dewan Pengarah BRIN tidak ex officio.

Sementara itu, berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Perpres 105/2022, ketua wakil ketua, dan staf khusus Ketua Dewan Pengarah BRIN yang bersifat ex officio diberikan fasilitas lainnya dalam pelaksanaan

tugas.

Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa fasilitas yang dimaksud diberikan dalam bentuk biaya perjalanan dinas. Biaya perjalanan dinas bagi ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota

Dewan Pengarah BRIN diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan, biaya perjalanan bagi staf khusus ketua Dewan Pengarah diberikan setingkat pimpinan tinggi madya. ● han

DPR Berharap Presiden Segera Kirim Nama Calon Komisioner KPK

JAKARTA (IM) - Anggota Komisi III DPR Arsul Sani berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mengirimkan nama calon komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke DPR, pengganti Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar yang mengundurkan diri setelah sempat terbelit persoalan etik.

"Semoga dalam masa sidang ini, Presiden dapat mengirimkan nama-nama dimaksud," kata Arsul dihubungi wartawan Jumat (26/8).

Jika nama calon pengganti Lili Pintauli dikirim maka DPR pun segera melakukan *fit and proper test* atau uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon yang diajukan Presiden tersebut.

Arsul pun berharap agar jumlah komisioner KPK saat ini segera dilengkapi, lantaran kepuasan publik terhadap lembaga ini tengah turun. Terutama, dalam hal kinerja Komisi Antirasuah.

"Dengan melengkapi kembali jumlah pimpinan KPK, maka lebih bisa diharapkan KPK meningkatkan kerjanya," tutur Arsul.

"Apalagi, saat ini survey

tingkat kepuasan terhadap lembaga penegak hukum, maka KPK berada di bawah Kejaksanaan dan juga Polri sebelum kasus Sambo," ujar Wakil Ketua MPR itu.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan, penentuan sosok pengganti Lili Pintauli Siregar sebagai pimpinan KPK masih dalam proses. Namun, dia menegaskan nama kandidat pengganti Lili akan diajukan secepatnya ke DPR.

"Masih dalam proses. Untuk pengganti dari Bu Lili Pintauli masih dalam proses. Karena cara baru saja surat pemberhentiannya minggu yang lalu sudah saya tanda tangani," ujar Jokowi usai berdialog dengan petani di Subang, Jawa Barat, Selasa (12/7).

"Dan ini masih dalam proses untuk penggantinya. Kami akan segera mengajukan (penggantinya) ke DPR. Secepatnya," tegasnya.

Jokowi mengatakan hal itu sudah lebih dari satu bulan. Namun, belum ada kabar nama-nama calon komisioner KPK yang dikirimkan Jokowi ke DPR, meski masa reses anggota Dewan telah berakhir pada 16 Agustus 2022. ● mei



FOTO: ANT

PEMERIKSAAN KASUS JUAL BELI JABATAN DI KABUPATEN PEMALANG

Tersangka selaku Komisaris PD Aneka Usaha (PDAU) Adi Jumal Widodo (kedua kanan), tersangka selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pemalang nonaktif Sugiyanto (kedua kiri) dan tersangka selaku PJ Sekda Pemalang Slamet Masduki (tengah) tiba untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (26/8). KPK memeriksa sejumlah tersangka dalam kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Bupati Tulungagung Dicecar KPK soal Sumber Uang yang Diterima Eks Pejabat Pemprov Jatim

JAKARTA (IM) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah selesai memeriksa Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo sebagai saksi dalam kasus suap terkait pengalokasian anggaran bantuan keuangan Pemprov Jawa Timur (Jatim).

Maryoto dicecar soal sumber uang yang diterima mantan Kepala BPKAD Provinsi Jatim Budi Setiawan (BS) sebagai tersangka. Kepala Bappeda Provinsi Jatim tahun 2017-2018 itu dijerat atas kasus dugaan suap pengalokasian anggaran bantuan keuangan Pemprop Jatim.

Dalam kasus ini, Budi Setiawan diduga menerima suap dengan total Rp10,25 miliar. Dugaan penerimaan suap itu terkait alokasi Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Jawa Timur untuk infrastruktur tahun 2015-2016, 2017, dan 2018, kepada Kabupaten Tulungagung.

Atas perbuatannya, Budi Setiawan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. ● han

kan pendalaman melalui pengetahuan para saksi antara lain terkait dugaan sumber uang yang diberikan pada tersangka BS dkk," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkat kepada wartawan, Jumat (26/8).

Terkait kasus ini, KPK telah menetapkan mantan Kepala BPKAD Provinsi Jatim Budi Setiawan (BS) sebagai tersangka. Kepala Bappeda Provinsi Jatim tahun 2017-2018 itu dijerat atas kasus dugaan suap pengalokasian anggaran bantuan keuangan Pemprop Jatim.

Dalam kasus ini, Budi Setiawan diduga menerima suap dengan total Rp10,25 miliar. Dugaan penerimaan suap itu terkait alokasi Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Jawa Timur untuk infrastruktur tahun 2015-2016, 2017, dan 2018, kepada Kabupaten Tulungagung.

Atas perbuatannya, Budi Setiawan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. ● han

DUGAAN DISUAP FERDY SAMBO

KPK akan Periksa Dua Petugas LPSK, Wakil Ketua LPSK: Kami akan Dampingi

JAKARTA (IM) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) akan mendampingi dua pegawainya yang akan diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal ini terkait laporan adanya dugaan suap yang dilakukan oleh mantan Kadiv Propam Polri, Irfan Pol Ferdy Sambo terhadap dua pegawai LPSK pada saat awal kasus kematian Brigadir J menguat ke permukaan publik.

Pada saat itu, dua pegawai LPSK yang hendak ingin menjalankan ibadah Salat Mahgrib pada saat itu, didampingi oleh beberapa orang petugas yang menyampaikan pesan dari Ferdy Sambo kala itu.

"Pada dasarnya kami akan penuh undangan tersebut (pemanggilan terhadap dua pegawai LPSK dugaan suap)," ujar Wakil Ketua LPSK, Edwin

Partogi kepada wartawan di LPSK, Jumat (26/8).

Selain memberikan dukungan moral berupa menemani dua pegawainya diperiksa oleh lembaga rasuah tersebut, pihak LPSK juga akan menyiapkan kuasa hukum apabila memang diperlukan dalam proses pemeriksaan terkait dugaan suap kepada dua orang pegawai tersebut.

"Oh iya tentu dong (akan diberikan pendampingan kuasa hukum untuk para pegawai)," tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufon memastikan pihaknya akan memanggil seluruh pihak terkait atas laporan dugaan suap oleh Ferdy Sambo terhadap Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember itu

mengatakan, saat ini laporan atas percobaan suap tersebut masih dalam proses. Terakhir, KPK telah meminta pula keterangan dari pegawai LPSK.

"Kami sedang berproses. Namanya laporan, tentu kami secara prosedural akan kami lakukan verifikasi. Kepada para pihak, yaitu kepada pelapor dan juga kepada pegawai LPSK sudah kami lakukan pemanggilan untuk memverifikasi. Hasilnya masih dalam proses," kata Ghufon di UIN Jakarta, Ciputat, Tangerang Selatan, Rabu (24/8).

Dengan kata lain, dia juga menegaskan akan memanggil pula tanpa terkecuali pihak terkait, termasuk terlapor yang disebutkan telah melakukan percobaan suap terhadap pegawai LPSK.

"Pokoknya setiap yang terkait pasti kami panggil," jelasnya. ● han

FOTO: ANT



PEMUSNAHAN ROKOK ILEGAL DI BEA CUKAI

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Jember Asep Munandar (kedua kanan), didampingi Kepala Satuan polisi Pamong Praja Situbondo Buchari (kanan), memusnahkan barang bukti rokok ilegal di Kantor Bantu Panarukan, Situbondo, Jawa Timur, Jumat (26/8). Kantor Bea Cukai setempat memusnahkan sebanyak 909.392 batang rokok ilegal hasil penindakan tahun 2020-2021 dengan potensi kerugian negara sebesar Rp1,2 miliar.